

# IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOREJO KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PAENAJAM PASER UTARA

Qolif Lestari<sup>1</sup>, Masjaya, Anwar

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dalam aspek- aspek tertentu. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Atau Tim Pendamping Kecamatan Penajam. Kepala Seksi Kesejahteraan Pemerintahan Desa Sidorejo, Agen E-Warong, dan Peserta KPM Program BPNT. Teknik pengumpulan data menggunakan study kepustakaan ( library research) dan penelitian lapangan (Field work research), meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan dengan baik dan lancar, namun ada terdapat sebagian kendala pada proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga tujuan kebijakan belum tercapai dikarenakan beberapa kendala seperti masalah pada mesin EDC yang dapat menghambat penyaluran bantuan tersebut, oleh karena itu perlu adanya tanggapan cepat oleh pelaksana program tersebut dalam menghadapi kendala pada mesin EDC. Keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau tim pendamping yang tidak seimbang dengan jumlah KPM pada setiap wilayah yang didampingi, sehingga perlu adanya evaluasi oleh pemerintahan daerah terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam pendampingan program BPNT.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan Masyarakat*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Qoliflestari@gmail.com

## **Pendahuluan**

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan ekonomi untuk mencapai taraf hidup rata-rata masyarakat, keadaan ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan ini sendiri disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut data BPS Pada bulan Maret tahun 2019 persentasi penduduk miskin Indonesia berjumlah sebesar 9,41% kurang dari 0,25% dari September 2018 dan kurang dari 0,41% dari maret 2018. Total penduduk miskin sebesar 25,14 juta orang pada maret 2019 menurun sebesar 0,53 juta orang pada September 2018 dan menurun sebesar 0,80 juta orang pada maret 2018. (Badan Pusat statistic 2019: <https://www.bps.go.id>).

Sedangkan untuk kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat dinamis. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di wilayah ini 9,03% turun menjadi 0,25% dari tahun 2017 sebesar 9,28%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga pernah meningkat sebesar 0,6% menjadi 8,68% pada tahun 2016 dan 9,28% pada tahun 2017. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara 04 Oktober 2019).

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 di jelaskan bahwa “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia” . Dan untuk pengimplementasian berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 2, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan jerat kemiskinan melalui program social. Salah satunya yaitu program penanggulangan kemiskinan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan program bantuan yang bertujuan untuk mengurangi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah Raskin ( Beras Miskin). Bantuan bersyarat ini di mulai sejak tahun 2017 dimana program tersebut merupakan bukti jelas dari komitmen pemerintah dalam melengkapi kecukupan pangan masyarakat kurang mampu yang bertajuk untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kemudian pada tahun 2018 pemerintahan mengambil kebijakn dengan mengubah Program bantuan Raskin menjadi bantuan social pangan melalui Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra). Bantuan Rastra adalah bantuan tanpa syarat berupa beras yang dibagikan ke setiap rumah tangga miskin sebanyak 10 kg setiap bulan tanpa uang tebusan.

Selama dua dekade pelaksanaan peralihan dari program Raskin Ke program Rastra, pada masa peralihan ini perlu diantisipasi dalam meningkatkannya rumah tangga miskin dibawah penyaluran Beras Sejahtera secara gratis. Berbagai masalah sering muncul dalam pelaksanaan program-program tersebut terutama terkait tidak tepat waktu penerimaan, salah sasaran, sehingga tidak diketahui lagi apakah bantuan tersebut untuk si kaya atau si miskin karena semua diberi bantuan, adanya biaya tambahan dalam penerimaan bantuan dan lain sebagainya .

Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program baru yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan perubahan dari program Rastra yang mampu tampil lebih baik melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kementrian, pejabat Pemerintahan Daerah, Bank, Bulog, Dan masyarakat. Besaran BPNT sebesar RP.110.000,00/KPM/bulan (Kemensos 2017) dan pendistribusiannya melalui melalui system e-voucher melalui jaringan system pembayaran elektronik interoperabilitas dan terhubung dengan melibatkan Bank Penyalur, principal, dan korporasi. Masyarakat yang menerima e-voucher dapat menukarkan voucher tersebut dengan beras dan bahan pangan lainnya sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan, e-voucher yang dikenal ( Kartu Keluarga Sejahtera/KKS ) ini telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2017 .

Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri merupakan Kabupaten yang berada di Kalimantan Timur yang sudah melaksakan dan menjalankan program ini yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Sepaku, Dan Kecamatan Babulu di 24 Kelurahan dan 30 Desa yang mana telah diluncurkan sebanyak kurang lebih 9.565 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dan Desa Sidorejo merupakan salah satu desa bagian dari Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah menerapkan program BPNT. Desa Sidorejo merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Petung, pada tahun 2010 tepatnya tanggal 08 Februari 2010 Desa Sidorejo dimekarkan dari Wilayah Kelurahan petung. sehingga dapat dilihat juga dari mayoritas penduduk Desa Sidorejo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Desa Sidorejo telah menerapkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sejak pertengahan awal bulan april 2019, dengan jumlah pnerima sekitar 48 KPM ( keluarga penerima manfaat) yang tersebar di 8 RT.

Sehubungan dengan pengenalan distribusi Rastra dan BPNT, perlu dilakukan kajian implementasi Rastra dan BPNT untuk merumuskan langkah-langkah alternstif untuk meningkatkan pelaksanaan program Rastar

dan BPNT. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis“ Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara” .

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Kebijakan***

Easton 1965 (Dalam Adam Idris 2012:7) mengatakan bahwa kebijakan publik didefinisikan yaitu pembagian nilai kekuasaan untuk masyarakat yang kehadirannya terikat. Terkait hal ini dalam kepentingan pemerintah yang bertindak untuk menyelesaikan masalah public. Sehingga dapat juga diselesaikan dalam bentuk intervensi pemerintah. Sedangkan Woll 1966 (Dalam Adam Idris 2012:8) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah untuk memberikan solusi social dengan secara langsung atau beberapa Lembaga yang memberi dampak kehiduoan masyarakat. Berikut mengenai dampak dari tindakan pemerintah tersebut adalah:

- a. Keputusan peraturan dibuat oleh politisi, pejabat pemerintah, atau orang lain yang berusaha memanfaatkan kekuasaan public untuk memberi dampak kehidupan masyarakat.
- b. Terdapat out put kebijakan, dimana keputusan yang dilaksanakan pada tahap ini menekan pemerintah untuk mengatur, menganggarkan, dan mengatur peraturan pada suatu kebijakan dapat memberi dampak pada kehidupan masyarakat.
- c. Timbulnya faktor yang mempengaruhi kebijakan merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

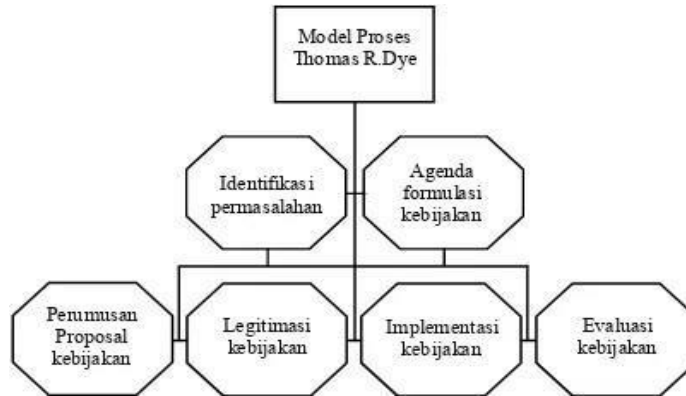
#### ***Proses Kebijakan Publik***

Menurut Thomas R. Dye 1992 (Dalam Joko Widodo 2010:16) proses kebijakan public meliputi beberapa hal berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah kebijakan dapat diidentifikasi dengan mengidentifikasi dengan menidentifikasi persyaratan untuk tindakan pemerintah.
- b. Agenda setting adalah kegiatan yang menarik perhatian para pejabat public terhadap keputusan apa yang dibuat atau isu-isu public.
- c. Perancangan kebijakan adalah langkah dimana suatu rancangan peraturan diusulkan dengan memperkarsai serta menyiapkan usulan kebijakan melalui proses organisasi, perencana kebijakan, pemangku kepentingan, birokrasi, pemerintah, presiden, serta Lembaga legislative.

- d. Peresmian peraturan dengan langkah proses politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- e. Pelaksanaan kebijakan dilakukan birokrasi, anggaran public, serta kegiatan yang diselenggarakan oleh badan-badan eksekutif.
- f. Evaluasi peraturan dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah, pers, dan masyarakat.

#### Proses Kebijakan Publik



Sumber : Thomas R.Dye 1992 (Dalam Joko Widodo 2010:16)

#### ***Konsep Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah peraturan sehingga terwujud tujuannya. Dalam implementasi kebijakan public ada dua kemungkinan yaitu implementasi langsung dalam bentuk program atau atau meliputi tutunan dari formula kebijakan atau kebijakan public. Susunan implementasi kebijakan terlihat jelas mulai dari program, proyek, dan kegiatan.

Van Meter dan Van Horn ( Dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya.Sedangkan Mazmanian & Sabatier dalam Joko Widodo ( 2010: 88) pelaksanaan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk Undang-undang , tetapi dapat juga berupa peraturan-peraturan eksekutif yang penting atau keputusan yudikatif, biasanya keputusan tersebut dengan jelas menyatakan solusi masalah, tujuan yang dicapai dari berbagai cara untuk melaksanakan proses implementasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat bahwa pelaksanaan implementasi adalah suatu tahapan yang menghadirkan sumber antara lain manusia, dan , keterampilan organisasi, yang dilaksanakan pemerintah dan

swasta, individu atau kelompok. Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Pada saat yang sama implementasi merupakan proses komersial, dimana kebijakan yang masih abstrak menjadi nyata. Implementasi kebijakan kegiatan yang menciptakan hasil, akibat, manfaat, dan dampak yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran.

### *1. Variabel yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*

Sedangkan menurut Edward III (Dalam Adam Idris 2012:65-67) mengajukan empat faktor atau variable yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut

#### a. Komunikasi

Pada proses implementasi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan dan dikomunikasikan untuk mengurangi bias implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas dan tidak ada kepastian maka bisa akan terjadi penolakan atau oposisi terhadap kelompok sasaran. Maka sebab itu diperlukan adanya tiga hal yaitu:

- a. Distribusi yang lancar akan terwujudnya eksekusi yang lancar.
- b. Pelaksanaan kebijakan mendapatkan kejelasan sehingga tidak ada kebingungan saat pengimplementasian kebijakan.
- c. Adanya ketetapan yang dilakukan pada aktor kebijakan, apabila yang diinformasikan tidak konsisten maka akan timbul kebingungan dalam implementasi kebijakan terkait.

#### b. Sumber Daya

Terkait pelaksanaan implementasi harus didukung oleh baik dari Sumber Daya Manusi (SDM), material, dan metode. Jika tidak adanya sumber daya kebijakan hanya tinggal diatas kertas dijadikan dokumen tapi tidak diimplementasikan untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

#### c. Disposisi

Pelaksana yang baik harus mempunyai sifat disposisi yang baik pula seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis. sehingga dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan serta ditetapkan oleh perumus keputusan.

#### d. Struktural Birokrasi.

Implementasi kebijakan memiliki peranan penting dalam melaksanakan struktur organisasi. Bagian dari struktur organisasi adanya Service Operating Procedur (SOP). Peran SOP sendiri itu adalah sebagai bagi pedoman bagi setiap pelaksana. Struktur organisasi yang terlalu Panjang dan lama akan melemahkan control dan menimbulkan birokrasi yang kompleks dan rumit. Hal ini pada gilirannya menyebabkan ketidakfleksibelan dalam fungsi organisasi.

***Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***

Dari beberapa program yang dibentuk oleh pemerintah ialah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimana pada program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dimana sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Presiden RI No.63 Tahun 2017 tentang penyaliran Bantuan Pangan secara Non Tunai. Program ini ialah bantuan pangan berupa sembako yang disalurkan secara non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mendapatkan kartu elektronik elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana kartu ini digunakan sebagai alat untuk membeli bahan pangan atau sembako di tempat yg telah bekerjasama atau e-warong dan bank. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut terdapat sistem penyimpanan saldo secara digital, yang mana masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dapat menyalurkan dana yang masuk untuk membelanjakan bahan pangan sembako.

Menurut regulasi Permensos No.10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016 Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan program pemerintah dimana sasaran pada program ini adalah kepada warga miskin yang sudah tercatat pada data di dalam program Keluarga Harapan (PKH) dimana setiap bulannya melalui alur mekanisme kartu elektronik yang hanya dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di e-warong atau pedagang bahan sembako yang terdaftar melengkapi dan memenuhi persyaratan serta bekerjasama dengan bank negara seperti Bank Bri, BTN dan lain sebagainya.

Adapun tujuan dari program BPNT antara lain sebagai berikut :

- a. Mengurangi tingkat pengeluaran KPM dengan pemenuhan kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi.
- d. Memberikan bantuan pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat program BPNT sebagai berikut:

- a. Bertambah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus mekanisme dalam perlindungan sosial dan pencegahan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi bantuan pangan sosial.
- c. Bertambahnya informasi akses terkait pelayanan keuangan dan perbankan, meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

### ***Konsep dan Indikator Kemiskinan***

Kemiskinan masalah social yang sangat berkaitan erat dengan kebijakan social. Kemiskinan dipandang sebagai penyebab masalah social menurut Undang-Undang nomor 13 Tahun tahun 2011 yang berbunyi “ Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunya sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya” .

Sedangkan kemiskinan didefinisikan oleh Badan Pusat statistic (BPS). Lembaga tersebut mendefinisikan dengan menetapkan acuan kriteria yang berlaku untuk pengeluaran per orang per hari. Pengangguran dan pendapatan rendah menjadi pertimbangan untuk menentukan indicator tersebut. Indicator kemiskinan menurut BPS tersebut adalah:

- a. Luas lantai bangunan rumah kurang dari 8m<sup>2</sup>/orang.
- b. Jenis lantai rumah terbuat dari bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding rumah dari bambu/rumbia/ kayu yang berkualitas rendah/tembok yang tidak di plaster.
- d. Tidak memiliki fasilitas untuk membuang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan aliran listrik.
- f. Sumber utama air minum biasanya dari sumur/ mata air terlindungi/sungai/dan air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari yaitu kayu bakar/arang/ minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu sekali.
- i. Hanya mampu membeli satu pasang pakaian dalam satu tahun.
- j. Hanya mampu makan satu kali atau 2 kali dalam sehari .



- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan perawatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas tanah 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, tukang bangunan, buruh perkebunan dan pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000/bulan.
- m. Pendidikan tertinggi atau terakhir kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan, barang yang dapat di jual dengan minimal rupiah.
- o. 500.000,- seperti kendaraan motor kredit atau non kredit, emas, ternak, perahu, atau barang modal lainnya.

### ***Metode Penelitian***

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut sugiyono (2015) adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi untuk memberikan konsep atau gejala dilapangan dan dikumpulkan apabila dianggap cukup dan menggambarkan kejadian fenomena yang diteliti dan perkembangan di masyarakat. Serta penggunaan teknik pengambilan data melalui penelitian kepustakaan, observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (Dalam Saldana, 2014).

Pada tahap awal peneliti akan mengambil seorang *key informan* yaitu pendamping program BPNT, dan *informan*, Staff desa yang mengurus kegiatan sosial dilingkungan desa, Agen E-warong, juga masyarakat penerima bantuan BPNT.

Fokus penelitian ini sangat penting sebagai alat untuk mengarahkan dan memandu alur penelitian. Tergantung pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian meliputi:

1. Fokus penelitian terkait Implementasi Bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi.
- d. Struktur birokrasi

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara..

### **Hasil Penelitian**

#### **Komunikasi dan sosialisasi**

Mengenai pengetahuan sosialisasi dan edukasi program BPNT yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Penajam, telah dilaksanakan terhadap pihak yang terlibat antara lain Pemerintahan Desa, Agen e-warong dan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial. Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi terkait Program BPNT yang disosialisasikan oleh tim koordinasi tingkat Kabupaten/Kota di Desa Sidorejo. Diadakannya sosialisasi ke semua pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung adalah kunci dari kesuksesan program tersebut, hal yang disampaikan terlebih dahulu ketika sosialisasi yaitu terkait perubahan program rastra menjadi BPNT kepada pihak staf desa dan masyarakat penerima bantuan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi yang menjelaskan tentang program BPNT ini berapa nominal yang didapatkan, waktu pencairan, dan apa saja yang didapat ketika mendapat program BPNT.

#### **Sumber daya**

Sumber daya manusia yaitu tim pendamping pada implementasi di desa sidorejo sudah memadai karena jumlah kpm di Desa Sidorejo yang tidak terlalu banyak sehingga dapat diatasi selain itu juga terdapat bantuan dari pemerintahan desa sidorejo sehingga mempermudah proses pelaksanaan program BPNT. Untuk fasilitas yang digunakan dan dibutuhkan saat pelaksanaan proses implementasi program BPNT juga sudah cukup memadai yaitu pemerintahan Desa Sidorejo yang memfasilitasi gedung atau aula yang dapat digunakan pada saat proses pelaksanaan baik dari awal sosialisasi sampai pada tahap pendistribusian.

#### **Disposisi (Deskripsi sikap)**

Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program BPNT dapat digolongkan pada masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan tersebut, dimana masyarakat sebagai KPM menunjukkan bahwa mereka merasa senang dengan adanya program BPNT karena dengan alasan dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan. Selain sikap dari peserta kpm yang merasa senang dengan adanya program bpnt, terdapat sikap tim pelaksana yaitu tim pendamping selama proses implementasi program BPNT dengan menunjukkan sikap sebagai tim pelaksana yang melaksanakan tugas nya dengan tepat, responsif terhadap

suatu masalah ataupun kendala dan aktif membimbing dari awal sosialisasi sampai pada tahap pendistribusian begitupun sikap saling bekerjasama antara tim pendamping dengan pemerintahan desa yang merupakan salah satu penunjang berjalannya implementasi program BPNT.

### **Struktur Birokrasi**

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur kerja dalam pelaksanaan program ini berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang di tetapkan dan berpedoman pada panduan program ini dengan adanya Pedoman Bantuan Umum Bantuan Pangan Non Tunai ( PEDUM BPNT). Dan diketahui bahwa program ini didukung oleh berbagai pihak yang terlibat yang mana struktur birokrasi berperan terhadap pelaksanaan program tersebut.

### **Faktor pendukung dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**

Faktor pendukung dalam mengimplementasi Program bantuan pangan non tunai (BPNT) yaitu pertama, adanya hubungan kerjasama yang baik dimiliki antara instansi dan lembaga yang berkaitan dengan program tersebut. Terciptanya hubungan baik dapat membantu dalam hal komunikasi serta kontribusi dalam melaksanakan program BPNT. Kemudian kedua, antusias dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap kegiatan baik dari kegiatan sosialisasi sampai penyaluran bantuan.

### **Faktor penghambat dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pendamping pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) . Pendamping di Kecamatan Penajam hanya terdapat 9 orang, setiap pendamping menerima KPM dari 200 sampau 250 yang mana dengan jumlah tersebut membuat pendamping merasa kewalahan dan keteteran. Dan juga Fasilitas mesin EDC yang sering error atau rusak merupakan satu di antara terkendalanya proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga masyarakat yang ingin menukarkan saldo yang masuk di kartu ATM atau kartu KKS dengan bahan sembako terhambat karena mesin EDC yang terkadang error untuk transaksi.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam unit komunikasi telah dilakukan melalui pengadaan sosialisasi yang disampaikan oleh TKSK kepada agen pendistribusian dan rumah tangga penerima.
2. Dalam unit Sumber daya manusia untuk tim pendamping BPNT Desa Sodorejo telah memadai dan tercukupi, sedangkan untuk fasilitas yang digunakan pada saat sosialisasi dan pendistribusian disediakan oleh pemerintah desa Sidorejo.
3. Dalam unit Disposisi, menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini terlihat dari antusias masyarakat dalam partisipasinya dalam sosialisasi.
4. Telah adanya pedoman atau SOP yang berisi prosedur-prosedur kerja dalam pelaksanaan program BPNT yaitu Pedoman Umum Bantuan Non Tunai (PEDUM BPNT).
5. Faktor pendukung dalam program BPNT ini yaitu pertama, adanya hubungan kerjasama yang baik dimiliki antara instansi dan lembaga yang berkaitan dengan program tersebut. Terciptanya hubungan baik dapat membantu dalam hal komunikasi serta kontribusi dalam melaksanakan program BPNT. Kemudian kedua, antusias dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap kegiatan baik dari kegiatan sosialisasi sampai penyaluran bantuan.
6. Faktor penghambat dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pendamping program tersebut. Dan juga mesin EDC yang pernah bermasalah bahkan pernah rusak menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bantuan tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin menukarkan saldo yang masuk di kartu ATM atau kartu KKS dengan bahan sembako terhambat karena mesin EDC yang terkadang error untuk transaksi.

#### *Saran*

1. Perlu memperkuat integritas dengan sasaran aparatur dan pihak daerah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) , dalam artian jika ada kekurangan pendamping yang lebih dari 200 KPM sebaiknya ditambah pendamping daerah agar jumlah penndamping tidak melebihi 200 KPM dan pendamping tidak kewalahan.

2. Implementasi pada Program BPNT ini harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan kemaslahatan bersama guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan.
3. Petugas yang terlibat dalam proses penyaluran harus cepat tanggap dalam menangani masalah mesin EDC
4. Dengan adanya kemudahan yang ditujukan dalam proses Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang mana diharapkan dalam proses implementasi program ini berjalan lancar tanpa kendala.

### **Daftar Pustaka**

- Idris, Adam. 2010. *Dialektika Kebijakan Publik*, Sleman Yogyakarta: CV. Bimotry.
- Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014 *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook*. Edisi ketiga. Sage Publications, Inc.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Gunawan, Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

### **Dokumen-dokumen :**

- UUD 1945 Pasal 34 ayat 2
- UU No.13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT).

Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016

**Sumber internet :**

<https://ppukab.bps.go.id/statictable/2018/09/12/280/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kabupaten-penajam-paser-utara-2010-2017.html>,(di akses pada tanggal 23 Januari 2020)

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (di akses pada tanggal 22 Januari 2020 )

Dokumen Pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai ( Kemensos RI)